

LABOR MARKET BRIEF



Photo by Canva

KEPALA LPEM FEB UI
Riatu M. Qibthiyah, Ph.D.

PIMPINAN REDAKSI
Muhammad Hanri, Ph.D.
(hanri@lpem-feui.org)

REDAKTUR PELAKSANA
Nia Kurnia Sholihah, S.E.
(nia.kurnia@lpem-feui.org)

EDITOR
Riatu M. Qibthiyah, Ph.D.

DAFTAR ISI

Perkembangan Upah Harian Buruh	2
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Indonesia	2



RINGKASAN

Bidang ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pencapaian pendayagunaan angkatan kerja nasional, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Keempat tujuan tersebut perlu dicapai dengan memperhatikan tolak ukur berdasarkan indikator-indikator yang dapat dimonitor pencapaiannya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyusun Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Indeks diharapkan ini akan menjadi salah satu basis pengukuran yang dapat mencerminkan pencapaian daerah dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan.

PERKEMBANGAN UPAH HARIAN BURUH

Pada bulan November 2020, BPS mencatat terjadi kenaikan rata-rata upah nominal harian buruh tani nasional sebesar 0,15% dibanding upah nominal buruh tani Oktober 2020 (Rp55.766) naik sebesar 2,19% dan dibandingkan dengan upah nominal buruh tani pada November 2019. Pola berbeda ditunjukkan rata-rata upah riil buruh tani pada November 2020 yang menurun sebesar 0,36% dibandingkan dengan upah riil buruh tani Oktober 2020 (Rp52.755) serta menurun sebesar 0,03% dibandingkn November 2019. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan daya beli pendapatan buruh tani pada November 2020 dibanding dengan tahun dan bulan sebelumnya.

Pola yang serupa ditunjukkan oleh upah nominal dan riil harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada bulan November 2020. Dari upah nominal harian buruh bangunan, tercatat ada kenaikan sebesar 0,04% pada November 2020 dibanding upah nominal harian buruh bangunan pada Oktober 2020 (Rp90.711) dan naik sebesar 1,94% dibandingkan pada November 2019. Akan tetapi, rata-rata upah riil harian buruh bangunan pada November 2020 mengalami penurunan sebesar 0,24% dibandingkan Oktber 2020 (Rp86.514). Selain itu, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan juga menurun sebesar 0,23% dibandingkan dengan November 2019. Oleh karena itu, terlihat bahwa terjadi penurunan daya beli pendapatan buruh bangunan pada November 2020 baik dibandingkan tahun maupun bulan sebelumnya.

RATA-RATA UPAH HARIAN BURUH		November 2019	November 2020	
	Upah Nominal Harian Buruh Tani	54.650 rupiah/ hari	55.848 rupiah/ hari	▲ 2,19%
	Upah Riil Harian Buruh Tani	52.584 rupiah/ hari	52.566 rupiah/ hari	▼ 0,03%
	Upah Nominal Harian Buruh Bangunan	89.081 rupiah/ hari	90.807 rupiah/ hari	▲ 1,94%
	Upah Riil Harian Buruh Bangunan	86.019 rupiah/ hari	86.311 rupiah/ hari	▼ 0,23%

Gambar 1. Rata-rata Upah Harian Buruh

Sumber: BPS (2020)

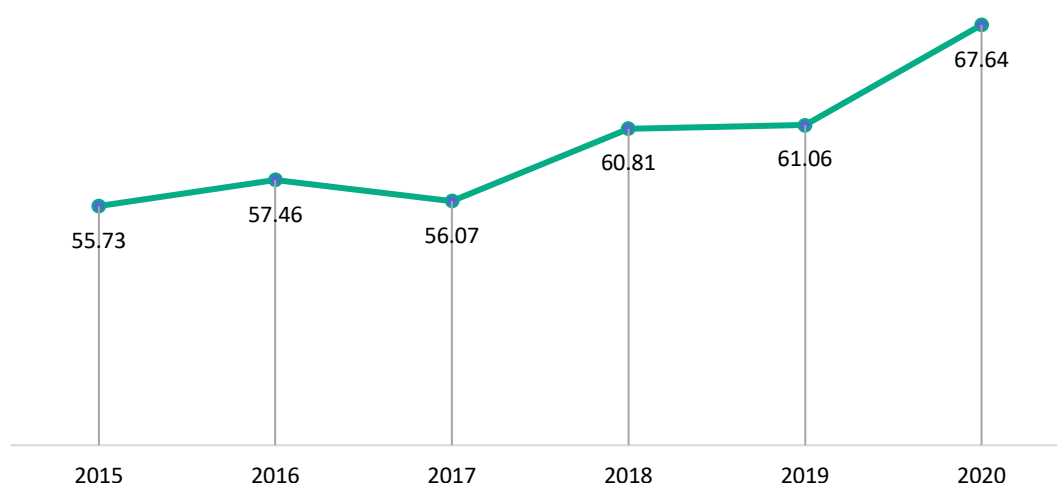
INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari tujuan pembangunan Indonesia. Empat tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari (i) pendayagunaan angkatan kerja nasional, (ii) pemerataan kesempatan kerja, (iii) perlindungan tenaga kerja, serta (iv) kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Keempat tujuan tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, yang dalam perjalanannya dibutuhkan suatu pengukuran untuk dapat dimonitor pencapaiannya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyusun Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) sejak

tahun 2011. Indeks ini menggambarkan beberapa variabel indikator ketenagakerjaan di setiap provinsi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terdapat sembilan indikator ketenagakerjaan yang mencerminkan kualitas pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Kesembilan indikator tersebut adalah (1) perencanaan tenaga kerja; (2) penduduk dan tenaga kerja; (3) kesempatan kerja; (4) pelatihan kerja dan kompetensi kerja; (5) produktivitas tenaga kerja; (6) hubungan industrial; (7) kondisi lingkungan kerja; (8) pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan (9) jaminan sosial tenaga kerja. Kesembilan indikator tersebut kemudian dijabarkan kembali ke dalam sub-sub indikator dan juga diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan demikian, diharapkan pembangunan ketenagakerjaan Indonesia juga dapat mengarah pembangunan yang lebih berkelanjutan terutama jika dilihat dari sisi agenda SDGs mengenai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak.

Penilaian Indeks Pembangunan Daerah dilakukan di tingkat provinsi dengan membagi provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan. Provinsi-provinsi di Indonesia dibagi ke dalam provinsi ke dalam kategori besar, sedang, dan kecil. Setiap tahunnya, data-data yang dikumpulkan untuk melihat capaian masing-masing indikator dan membentuk Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dihimpun dari unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, BPJS Ketenagakerjaan, maupun dari pemerintah daerah terkait. Adapun teknis perhitungan dari masing-masing indikator dan subindikator pembangunan ketenagakerjaan diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Mulai tahun 2019, pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dilakukan dengan basis *website*.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Indonesia 2015-2020

Sumber: Press Release Kementerian Ketenagakerjaan

Sejak tahun 2017, tercatat bahwa Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan secara nasional terus meningkat. Pada tahun 2020, Indonesia masuk dalam kategori menengah atas dengan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tercatat sebesar 67,64, meningkat sebesar 6,58 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, delapan indikator selain indikator pengupahan dan kesejahteraan pekerja tercatat mengalami kenaikan sehingga mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Hal yang dicatat menjadi salah satu pendorong yang kuat dari peningkatan indeks ini adalah semakin tingginya inisiatif pemerintah daerah dalam perencanaan daerah terkait dengan ketenagakerjaan. Peningkatan ini juga didorong oleh pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas yang semakin baik.

Pada tahun 2020, tercatat bahwa provinsi dengan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan lebih dari 66,00 meningkat menjadi sebanyak 23 provinsi. Kenaikan ini tercatat sangat tinggi karena pada tahun 2019 hanya ada 7 provinsi yang memiliki indeks di atas 66,00. Oleh karena itu, provinsi-provinsi tersebut masuk ke dalam kategori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menengah-atas. Disinyalir peningkatan signifikan ini terjadi karena semakin tingginya kesadaran pemerintah daerah untuk menyelaraskan pembangunan di daerah dengan pencapaian SDGs terutama di bidang ketenagakerjaan.

Tabel 1. Provinsi dengan Indeks Terbaik Berdasarkan Kategori Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Provinsi

No	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Tahun 2019		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Tahun 2020	
Kategori Besar*				
1	Jawa Tengah	65,71	Sulawesi Selatan	72,06
2	Jawa Timur	64,74	Jawa Timur	68,74
3	Sulawesi Selatan	64,73	Jawa Tengah	68,64
Kategori Sedang				
1	DI Yogyakarta	70,79	DKI Jakarta	78,29
2	DKI Jakarta	68,34	Kalimantan Timur	77,21
3	Kalimantan Tengah	67,94	DI Yogyakarta	74,77
Kategori Kecil				
1	Kalimantan Utara	69,63	Bali	75,38
2	Papua Barat	67,07	Kalimantan Utara	72,65
3	Sulawesi Tenggara	53,49	Papua Barat	71,30

*Kategori berdasarkan tingkat intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan

Sumber: Press Release Kementerian Ketenagakerjaan dan Katadata

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tertinggi pada tahun 2020 dengan indeks sebesar 78,29. Dua provinsi tertinggi berikutnya adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Bali dengan indeks masing-masing sebesar 77,21 dan 75,38. Di sisi lain, Provinsi Sumatera Utara meruakan provinsi yang menerima penghargaan akselerasi indeks terbaik pada tahun 2020 karena Indeks Pembangunan Ketenagakerjaannya tercatat naik lebih dari 10 poin, dari 52,11 pada tahun 2019 menjadi 66,90 pada tahun 2020. Selain itu, Provinsi Sumatera Utara juga mengalami kenaikan indeks minimal pada 5 indikator utama yang dinilai. Selain provinsi-provinsi tersebut, beberapa provinsi lainnya juga meraih indeks tertinggi pada masing-masing indikator utama yang dinilai.

Tabel 2. Provinsi dengan Indeks Terbaik Berdasarkan Masing-Masing Indikator

No	Indikator	Provinsi dengan Indeks Terbaik 2020
1	Perencanaan Tenaga Kerja	DI Yogyakarta
2	Penduduk dan Tenaga Kerja	Bali
3	Kesempatan Kerja	DKI Jakarta
4	Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Sumatera Barat
5	Prouktivitas Tenaga Kerja	Jambi
6	Hubungan Industrial	Sumatera Bara
7	Kondisi Lingkungan Kerja	Maluku Utara
8	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Kepulauan Riau
9	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DKI Jakarta

Sumber: Press Release Kementerian Ketenagakerjaan

Dengan adanya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini, diharapkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang tercermin dari kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan lebih terukur dan terarah. Selain itu, indeks juga dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan Indonesia.

Referensi

BPS. 2020. Berita Resmi Statistik, Desember 2020.

Kemnaker. 2020. Laporan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019.

Press Release Menteri Ketenagakerjaan R.I. “Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020 Meningkatkan Secara Signifikan”

Sumber Gambar

Halaman Cover : Photo by Canva

Halaman 2 : Icons made by wanicon from www.flaticon.com

Halaman 2 : Icons made by Darius Dan from www.flaticon.com